



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Garuda No. 1 Telp. (0371) 21582 - Fax 23657 Sumbawa Besar

NOTA DINAS

Nomor: *J00 / 626* /EKON/X/2018

Kepada Yth. : Bupati Sumbawa selaku Ketua TPID  
Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa selaku Pelaksana Harian TPID  
Tanggal : 4 Oktober 2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Rekomendasi Kebijakan**

Dengan hormat,

Bahwa penyelenggaraan pengendalian harga yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 187 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 201 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Tim Pemantauan dan Analisa Perkembangan Harga di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018.

Bahwa kedua tim tersebut di atas bersinergi dalam pengendalian harga. Tim Pemantauan dan Analisa Perkembangan Harga (TPAPH) pembinanya adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan, ketuanya adalah Kepala Bagian Perekonomian Setda sedangkan anggotanya dari OPD-OPD terkait. Pekerjaannya melakukan pemantauan dan analisa perkembangan harga. TPAPH diposisikan sebagai tim dan sistem pendukung keputusan bagi TPID dengan rekomendasi kebijakan diajukan ke TPID. Selanjutnya, TPID menetapkan rekomendasi kebijakan yang diajukan kepada Bupati Sumbawa.

Pembentukan TPAPH berangkat dari evaluasi terhadap peran dan fungsi TPID Kabupaten Sumbawa yang dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda selaku Sekretaris TPID pada tanggal 26 Oktober 2017. Rapat evaluasi tersebut memberikan evaluasi serius pada tata kelola TPID Sumbawa sebagai forum pengambil keputusan yang sifatnya multi sektor sehingga perlu ada sinergitas dan integrasi sistem dalam penyelenggaraan TPID agar TPID menjadi forum yang efektif dan bermanfaat. Evaluasinya, TPID adalah forum yang strategis, namun minim kebijakan pengendalian harga.

Hasil evaluasi itu akhirnya menghendaki adanya inovasi dalam tata kelola TPID yang mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan pengendalian harga yang diyakini akan mempengaruhi banyak sektor pembangunan, baik sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur daerah. Inovasi ini diharapkan menjadi sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan data dan program yang ada di seluruh OPD terkait.

Bagian Perekonomian Setda yang menangani urusan inflasi daerah membuat inovasi dan mendaftarkan ke lomba inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Sumbawa. Inovasi itu bernama: SIANDINI. Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi.

TPAPH menyadari harga dibentuk oleh banyak faktor. Faktor produksi, transportasi, kebijakan pemerintah, permintaan dan penawaran, dollar amerika dan faktor-faktor sosial lainnya. Faktor-faktor inilah yang akan dianalisis terhadap harga-harga barang yang dipantau. TPAPH benar-benar ingin membangun tata kelola TPID yang baik, yang kredibel, dan yang akuntabel untuk dijadikan bahan baku pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan pengendalian harga di daerah. Harapannya, harga-harga setabil, masa depan terkait perkembangan harga dapat diprediksi dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Maka, sekarang di Kabupaten Sumbawa, ada 2 (dua) organ dalam penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah. TPID dan TPAPH. TPID akan melakukan rapat koordinasi setelah bahan bakunya lengkap dari TPAPH. TPAPH menggunakan SIANDINI dalam memantau harga dan menganalisis semua faktor dan melaporkannya ke TPID. SIANDINI terdiri dari 2 (dua) instrumen: tim survey yang menjadi bagian dalam TPAPH dan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, SIANDINI sebagai sebuah inovasi berperan sebagai Sistem Pendukung Keputusan. SIANDINI diharapkan dapat memberikan peringatan untuk melakukanantisipasi dan melaksanakan pengendalian harga yang tepat sasaran dan tepat guna.

Berdasarkan rangkaian rapat koordinasi yang telah dilakukan, disampaikan beberapa rekomendasi kebijakan sebagaimana terlampir dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Perlu ditetapkan objek barang yang akan dipantau oleh TPAPH sesuai hasil rapat koordinasi tanggal 18 April 2018 yang selanjutnya ditetapkan setiap tahun;
2. Hasil kesepakatan Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Sumbawa yang langsung dipimpin oleh Bupati Sumbawa selaku Ketua TPID dan Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian TPID pada tanggal 26 September 2018 untuk diimplementasikan dengan instrumen kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pengendalian harga. Kesepakatan rakor TPID antara lain;
  - a. Menyusun Surat Edaran yang menggerakkan partisipasi dan gotong royong seluruh komponen masyarakat dalam gerakan Sumbawa Berdaulat Pangan;
  - b. Menyusun Peta Jalan (*road map*) dan rencana aksi penyelenggaraan pengendalian harga yang tersistematis dan berkelanjutan;
  - c. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TPAPH serta pengembangan SIANDINI sebagai salah satu inovasi tata kelola.

Nota Dinas ini disampaikan sebagai laporan dan pertimbangan bagi Bupati Sumbawa selaku Ketua TPID Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan tindak lanjut penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah yang sinergis dan terintegrasi bersama aktor-aktor kebijakan lainnya, baik di dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, antar kabupaten/ kota, dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat. Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa  
Selaku Pelaksana Harian TPID,





# PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

## TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Jalan Garuda No. 1 Telp. (0371) 21582 – Fax.(0371) 23657 Sumbawa Besar

### KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018

Sumbawa Besar, 26 September 2018

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa. Setelah memperhatikan Laporan Tim Pemantauan dan Analisa Perkembangan Harga serta pembahasan dan rekomendasi Tim TPID, Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Sumbawa menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Perekonomian sebagai Ketua Tim Pemantauan dan Analisa Perkembangan Harga menyusun Surat Edaran Bupati Sumbawa atau bentuk regulasi daerah lainnya yang dipandang efektif dalam rangka penggalangan dukungan dan partisipasi seluruh komponen pembangunan (Pemda-Swasta-Komunitas Masyarakat-Perguruan Tinggi-Pers) di Kabupaten Sumbawa terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi melalui percepatan dan perluasan cakupan program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) atau strategi lain yang bertujuan mewujudkan Sumbawa Berdaulat Pangan. Target tuntas pada minggu II Oktober 2018;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa mengkoordinasikan implementasi kesepakatan sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa menyiapkan langkah-langkah antisipasi terjadinya inflasi terhadap beberapa barang pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019 bersama OPD terkait yang meliputi:
  - a. Ketersediaan;
  - b. Distribusi/ sistem logistik; dan
  - c. Peluang kerjasama dengan daerah lain melalui optimalisasi peran BUMD;
  - d. Monitoring dan Pengawasan yang melibatkan unsur vertikal seperti Polri, BPS, Bulog dan Bank Indonesia Perwakilan NTB; dan
  - e. Penguatan kapasitas SDM dan Tata kelola melalui Study Komparasi terhadap Kabupaten *Best Practice* dalam penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah.
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa mengkoordinasikan penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) dan Rencana Aksi Penyelenggaraan Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan/ Peraturan Bupati;
5. Tim Pemantauan dan Analisa Perkembangan Harga melaksanakan penguatan dan pengembangan Sistem Informasi Peringatan Dini Inflasi (SIANDINI) sebagai sistem pendukung keputusan (SPK) TPID Kabupaten Sumbawa yang kredibel dan akuntabel;
6. Rencana tindak lanjut implementasi kesepakatan sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai 5 di atas dilaporkan kepada Bupati Sumbawa sekaligus Ketua TPID melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa sekaligus Pelaksana Harian TPID Kabupaten Sumbawa;
7. Rapat Koordinasi TPID berikutnya diagendakan untuk melakukan evaluasi terhadap *progress* pelaksanaan sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai 5 kesepakatan ini.

**PESERTA RAPAT KOORDINASI TPID KABUPATEN SUMBAWA,**  
"Sinergi Pengendalian Harga Terintegrasi Mewujudkan Sumbawa Berdaulat Pangan"  
Sumbawa Besar, 26 September 2018

**BUPATI SUMBAWA**



M. Husni Djibril, B.Sc.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA**




Drs. H. Rasyidi

**KEPALA BANK INDONESIA  
PERWAKILAN NTB**



Achris Sarwani

**Pt. ASISTEN  
ADMINISTRASI UMUM**



Drs. H. Muhammadiyah, M.Si.

**INSPEKTUR KABUPATEN  
SUMBAWA**



Ishak S

**DINAS PERDAGANGAN  
PROVINSI NTB**



Muhammad

**BIRO PEREKONOMIAN  
PROVINSI NTB**



H. Suryadi, M.Si.

**DINAS PERTANIAN  
KABUPATEN SUMBAWA**



H. Syahri

**BAPPEDA KABUPATEN  
SUMBAWA**



E. S. Adi Nusantara, S.T., MT.

**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SUMBAWA**



M. Said

**DINAS KOPERASI UKM INDAG  
KABUPATEN SUMBAWA**



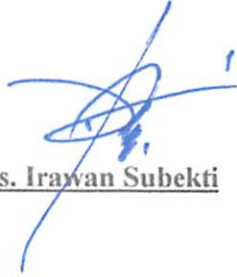
Lang Rudi, SH.

**DINAS PANGAN KABUPATEN  
SUMBAWA**



Khaeruddin

KEPALA BAGIAN  
PEREKONOMIAN



Drs. Irawan Subekti

DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN KABUPATEN  
SUMBAWA



Lalu Tawakal

DINAS KOMINFOTIK  
KABUPATEN SUMBAWA



H. Ahmadi, SE.

BULOG KABUPATEN  
SUMBAWA



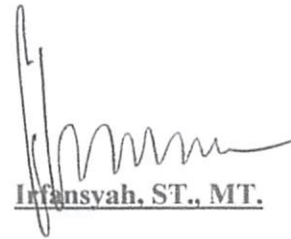
Baharuddin

BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN SUMBAWA



I Ketut Sumadi Arta, SH.

BAGIAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN SUMBAWA



Irfansyah, ST., MT.

KASUBBAG PPD & ESDM  
(Notulis)



Andi Kusmayadi, S.Pi., M.Si.